

KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN

Oleh:

Ruddy Firman S¹, Sri Wahyuni², Rahma Syafitri³

¹Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email:Ruddyfirmansy@gmail.com, sriwahyuni@umrah.ac.id, Rahmasyafitri@umrah.ac.id

ABSTRACT

Women and politics in Indonesia, their role is still less dominant than the role of men. Even though the government has issued regulations that can make women's representation stronger in the legislative realm. The Indonesian government issued Law no. 8 of 2012 which requires political parties to send at least 30% of women in parliament. But what happened to the people of Bintan district, especially in the eastern Bintan sub-district, they did not necessarily trust women to run as legislative candidates. The research method used is qualitative research. The technique used in determining the informants is purposive sampling with the criteria of informants from the East Bintan community who have participated in the general election and the government overseeing the election. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation techniques. So that the results of community research were obtained that they thought that it was enough for women to do housework. There are many factors that cause them to lack confidence in women to run as legislative candidates, such as they did not recognize the female candidates before and they doubted the quality of the female candidates themselves. Seeing the number of people in the East Bintan sub-district who do not trust women to run as legislative candidates, they have views such as: Ability and experience, Culture, Social Status

Keywords: trust, society, female legislative candidates

ABSTRAK

Perempuan dan politik di Indonesia, perannya masih kalah dominan dibandingkan dengan peran laki laki. Padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang dapat membuat representasi wanita lebih kuat di ranah legislatif. Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 8 tahun 2012 yang mengharuskan partai politik mengirim minimal 30% perempuan di dalam parlemen. Namun yang terjadi pada masyarakat kabupaten Bintan khususnya pada kecamatan Bintan timur, mereka tidak semerta-merta mempercayai perempuan untuk maju menjadi bakal calon legislatif. Metode penelitian yang di gunakan yakni penelitian kualitatif. Adapun Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah *purposive*

sampling dengan kriteria informan masyarakat Bintan Timur yang telah mengikuti pemilihan umum dan pihak pemerintah yang mengawasi dalam pemilu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga diperoleh hasil penelitian masyarakat bahwa Mereka beranggapan bahwa perempuan cukup melakukan pekerjaan rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan mereka kurang percaya kepada perempuan untuk maju menjadi calon legislative seperti mereka tidak mengenali caleg perempuan itu sebelumnya dan mereka meragukan kualitas caleg perempuan itu sendiri. Melihat banyaknya masyarakat kecamatan Bintan timur yang kurang mempercayai perempuan untuk maju menjadi calon legislatif mereka memiliki pandangan seperti :Kemampuan dan pengalaman ,Budaya,Status Sosial

Kata kunci : kepercayaan, masyarakat, calon legislative perempuan

I. PENDAHULUAN

Perempuan di Indonesia sejak dulu sudah tergabung di dalam organisasi-organisasi sosial yang semula fokusnya untuk perbaikan dalam hidup berkeluarga, dan meningkatkan kecakapan seorang ibu. Kemuculan organisasi ini merupakan realisasi dari R.A Kartini untuk memperjuangkan kedudukan sosial wanita. Namun seiring berjalannya waktu organisasi perempuan berubah haluan menjadi masalah yang menyangkut. Setelah tahun 1920, organisasi wanita semakin meluas dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dan dilakukan bersama organisasi politik induk. Dengan semakin bertambahnya organisasi wanita, setiap organisasi politik mempunyai bagian kewanitaan, misalnya Wanudyo Utomo yang menjadi bagian dari Sarekat Islam, kemudian berganti nama menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia. Berbicara tentang perempuan dan politik di Indonesia, perempuan di Indonesia masih kalah dominan dibandingkan peran laki-laki yang terjun untuk berpartisipasi ke dunia politik. Padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang dapat membuat representasi wanita lebih kuat dan seimbang pada ranah legislatif. Pemerintah Indonesia dengan bijak telah meratifikasi amanat konferensi Beijing yang menginginkan *affirmative action* dengan hadirnya 30 % perempuan pada sebuah parlemen. Keterwakilan perempuan ini mulai mendapatkan landasan hukumnya setelah DPR mengesahkan UU No.12/2003 yang pada awalnya tentang pemilihan umum, dan sekarang memakai UU No.8/2012 yang mengharuskan partai politik mengirim minimal 30% caleg perempuan untuk berkontribusi di ajang pemilu legislatif baik di DPR pusat sampai DPRD tingkat II atau tingkat kabupaten/kota. Namun, UU pemilihan umum tersebut tak serta merta meloloskan 30% pula ke kursi dewan, kemudian hal inilah yang menjadi masalah, apakah keterwakilan 30% hanya sampai pada kuantitas calon perempuan dalam pemilu legislatif lalu berhenti disana. Lantas bagaimana dengan representasi yang riil, yakni kuantitas dan kualitas perempuan di dalam parlemen itu sendiri. Keterwakilan perempuan berdasarkan sumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di parlemen pada 2019 hanya berjumlah sebanyak 97 orang atau 17,32 persen dari total 560 orang. Angka ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota DPR RI wanita periode 2009-2014 yang berjumlah 100 orang atau 17,86 persen dari total 560 jiwa. Dari data tersebut bahwa dari dua periode parlemen yang telah dijalani bisa disimpulkan bahwa kedudukan perempuan di parlemen masih jauh dari setengahnya bahkan malah mengalami penurunan meskipun tidak menurun secara drastis

Sebenarnya di dalam kepemimpinan baik yang di pimpin oleh laki-laki maupun perempuan dengan tujuan yang sama hanya ciri fisik yang saja yang berbeda sebagaimana yang di kutip oleh Kimbal Young dalam Kartono(1983 : 40) bahwa: kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang di dasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan akseptasi/penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Dengan adanya sumbangsih dari para wanita ini pun partisipasi wanita di bidang politik pun tidak boleh di pandang sebelah mata oleh para kaum lelaki. Hal ini dikarenakan bahwa setiap masyarakat merupakan subyek pembangunan yang tidak terlepas dari peranan perempuan yang terlibat di dalamnya, sehingga partisipasi wanita pun perlu di perhitungkan jika tidak ingin disebut perempuan Indonesia ketinggalan di bandingkan wanita di negara lain.

Selain itu, kita harus mengerti pula bahwa partai-partai itu adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai ideologi sama, agar di dalam meneruskan suara merupakan suatu kesatuan yang baik. Dengan mempunyai kesadaran ini wanita pun dapat berdiri sendiri dengan kecerdasannya untuk memilih partai yang menjadi cita-citanya. Jika wanita duduk pada suatu partai, bukanlah semata-mata digunakan untuk melaksanakan tugas untuk menyediakan jamuan rapat partai atau kedatangan tamu agung, tetapi memberikan suaranya bersama dengan anggota laki-laki.

Akan tetapi, faktanya tidak di prioritaskan perempuan di politik masih terjadi di parlemen. Buktinya fakta bahwa yang mengisi kursi 30 persen di DPR adalah istri dan anggota keluarga dari elit partai/pejabat pemerintahan, ataupun mempunyai hubungan kekuasaan di lingkaran elit. Sedikit sekali perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif tanpa mempunyai hubungan keluarga/personal dengan para elit partai. Sehingga suara 30 persen untuk perempuan di DPR menjadi celah bagi partai untuk berbuat curang, hal ini menggambarkan bahwa perempuan masih tertindas secara politik. Tentunya gerakan perempuan mempunyai tugas berat untuk melakukan kegiatan penyadaran terhadap masyarakat yang sudah lama menganut sistem politik patriarki.

Banyaknya masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa perempuan Indonesia masih harus berfokus pada peran domestik dan reproduksi yang dapat menghambat kemajuan mereka pada bidang politik. Hal tersebut merupakan rekayasa kultur dan tradisi yang menciptakan pelabelan atau stereotipe tertentu pada perempuan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Hingga perempuan susah untuk ikut berpolitik. Berbagai macam hambatan pun banyak jika perempuan ikut berpolitik, menurut khofifah Indah Parawansa bahwa Faktor pertama yakni berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini public mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan

Budaya patriarki membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan terjadinya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Menurut Durkheim dalam Abbas, pembagian kerja diawali oleh adanya perubahan dalam diri individu melalui proses sosialisasi dan diinternalisasikan orang-orang di lingkungan tempat manusia itu dibesarkan. Internalisasi sedemikian rupa menurut Djajaneegara melahirkan pelabelan atau stereotipe bahwa laki-laki adalah sosok yang mandiri, agresif, bersaing, memimpin, berorientasi keluar, penegasan diri, inovasi, disiplin dan tenang. Sedangkan perempuan adalah sosok yang tergantung, pasif, lembut, nonagresif, tidak berdaya saing dan mengandalkan naluri (Abbas, 2006). Keterlibatan

perempuan yang ada di Kepulauan Riau mengenai pembangunan tidak sampai situ saja. Di bidang politik itu sendiri pun perempuan di Kepulauan Riau sudah berpartisipasi dengan mengikuti pemilihan umum 2019 di daerah pemilihan Kepulauan Riau.

Tabel 1.1 Jumlah Calon Legislatif yang berpartisipasi di Kepulauan Riau Periode Tahun 2019-2024

Jumlah partai	Calon laki-laki	Calon perempuan	Total
16 partai	28 calon	29 calon	57 calon legislatif

Sumber : BPS Kepulauan Riau

57 calon legislatif nantinya akan memperebutkan 4 kursi yang ada pada DPR RI. Dari jumlah yang ada pada data tersebut tentunya bisa di bilang perempuan yang ada di Kepulauan Riau sudah banyak yang berkompentensi di bidang politik dan tidak hanya berperan pada peran domestik saja.

Selain itu di Kabupaten Bintan sendiri, partisipasi politik perempuan sudah bisa di bilang lumayan, pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten khususnya di dapil 3 jumlah calon legislatif perempuan sudah bisa dibilang banyak.

Tabel 1.2 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Bintan Dapil 3 periode Tahun 2019-2024

No	Nama partai	Jumlah calon legislatif	
		Laki-laki	Perempuan
1	Partai kebangkitan Bangsa	-	1
2	Gerindra	4	3
3	PDIP	4	3
4	Golkar	4	3
5	Nasdem	4	3
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	
7	Partai Berkarya	4	2
8	PKS	4	3
9	Partai persatuan Indonesia	4	2
10	PPP	2	1
11	PSI	-	-
12	PAN	4	3
13	Hanura	4	2
14	Demokrat	4	3
15	PBB	1	1
16	PKPI	4	3
Total		42	37

Sumber : KPU Bintan

Dari data yang di ambil dari KPU Bintan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan untuk mengikuti pemilihan umum di Kecamatan Bintan Timur sudah mulai berani dan percaya diri untuk berpartisipasi di pemilihan umum. Para calon legislatif perempuan ini mulai sadar bahwa peran nya mereka di politik pun bukan hanya sebagai pemenuhan kuota saja, melainkan mereka

harus berani keluar dari zona nyaman agar bisa memperjuangkan hak-hak mereka dan menyuarakan apa yang bisa dilakukan oleh para kaum perempuan di dunia politik.

Selain itu mereka juga beranggapan bahwa perempuan semakin memiliki kapasitas yang boleh dibilang setara dengan laki-laki karena perempuan juga sudah mengenyam pendidikan khususnya pendidikan di dunia politik, ungkap Sri Wahyuni salah satu calon legislatif perempuan yang berasal dari partai Demokrat dapil 3 Kecamatan Bintan Timur.

Tabel 1.3 Daftar Calon Terpilih DPRD Kab. Bintan Dapil 3 Tahun 2019-2024 Berdasarkan Jumlah Suara

Asal Partai	Nama Calon	Jenis kelamin	Jumlah suara
Golkar	Hasriawady	Laki laki	1.798 suara
Demokrat	Zulfaefi	Laki laki	1.633 suara
Demokrat	Sri Wahyuni	Perempuan	1.629 suara
Hanura	Tarmizi	Laki laki	1.085 suara
Golkar	Aisyah	Perempuan	1.043 suara
PKS	Muttaqin	Laki laki	944 suara
NasDem	Yanti Maryanti	Perempuan	889 suara

Sumber : KPU Kabupaten Bintan

Namun apabila dilihat dari hasil pemilihan pada tahun 2019, calon legislatif perempuan masih kalah dominan dibandingkan dengan calon legislatif laki-laki. Calon legislatif perempuan masih kalah populer dibandingkan calon legislatif laki-laki yang sudah bisa di bilang lebih populer dan telah lama terjun ke dunia politik. Sebut saja Zulfaefi dan Hasriawady, beliau merupakan politikus dari Bintan yang telah lama bergabung di kancah perpolitikan di Kabupaten Bintan yang pastinya masyarakat Kab. Bintan khususnya kecamatan Bintan Timur sudah paham sepak terjang mereka di kancah perpolitikandi Kecamatan Bintan Timur.

Tabel 1.4 Daftar Calon Anggota DPRD Kab. Bintan Kec. Bintan Timur Periode Tahun 2014-2019

No	Nama Partai	Jumlah calon legislatif	
		Laki-laki	Perempuan
1	Nasdem	7	3
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6	4
3	Partai Keadilan Sejahtera	7	3
4	PDIP	7	3
5	Golkar	7	3
6	Gerindra	7	3
7	Demokrat	7	3
8	PAN	7	3
9	Partai Persatuan Pembangunan	7	3
10	Hanura	7	3
11	Partai Bulan Bintang	7	3
12	PKPI	1	0
Total		77	64

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Bintan

Sebelum itu, dilihat dari pemilihan umum periode sebelumnya, yakni pada tahun 2014, pemenuhan kuota 30% pun tetap sudah diterapkan pada pemilihan umum 2014. Akan tetapi

apabila dilihat dari hasilnya tidak ada calon legislatif perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD Kab. Bintan untuk 2014 seperti yang di tampilkan pada data berikut ini:

Tabel 1.5 Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Bintan periode Tahun 2014-2019

No	Partai Politik	Nama Calon Terpilih	Jenis kelamin	Suara Sah
1	Partai Nasdem	Helmy,SH	Laki laki	692 suara
2	Partai Keadilan Sejahtera	Muttaqin	Laki laki	617 suara
3	PDI Perjuangan	Tri Jono,S,kom	Laki laki	1.149 suara
4	Partai Golkar	H. Lamén Sarihi,SH,MH	Laki laki	1.159 suara
5	Partai Golkar	H.Amran S,IP	Laki laki	1.166 suara
6	Partai Golkar	Hasriawady	Laki laki	1.923 suara
7	Partai Demokrat	Zulfaefi,SE	Laki laki	1.773 suara
8	Partai Demokrat	Azman,SE	Laki laki	1.857 suara
9	Partai Amanat Nasional	Ir. Arif Jumana Sar'an	Laki laki	1.145 suara
10	Partai Hanura	Drs. Muhammad Zuhdi	Laki laki	551 suara

Sumber : KPU Bintan

Dilihat dari hasil pemilihan umum tahun 2014, tidak ada calon legislatif perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD Kab.Bintan.Padahal apabila dilihat dari selisih calon nya, hanya berbeda sedikit. Lantas, sebenarnya apa yang membuat masyarakat tidak bisa memilih para calon legislatif perempuan itu sehingga tidak adanya satupun para calon legislatif perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD.

Melihat dari 2 periode pemilihan umum yakni pada tahun 2014 dan 2019, Berdasarkan penelusuran penulis bahwa masyarakat memilih calon legislatif perempuan melihat kepada latar belakang yang dimiliki dari calon legislatif perempuan ini sangat beragam. Ada beberapa calon yang memiliki latar belakang politik. Adapula calon legislatif perempuan yang belum memiliki pengalaman di dunia politik. Ini menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih calon legislatif perempuan

Selain dengan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, masyarakat Kecamatan Bintan Timur juga memiliki karakteristik untuk memilih calonnya masing-masing. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, yang menjadi karakteristik masyarakat Kecamatan Bintan Timur yakni: pertama mereka mengetahui ciri fisik orang yang akan mencalonkan dirinya itu seperti apa. Seperti yang diketahui, bahwa masyarakat disana itu harus mengetahui seperti apa calon itu sendiri,sering kah berbaur dengan masyarakat dan juga apakah calon itu. Mereka menginginkan calon yang akan memimpin di masyarakat itu sering berbaur dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selanjutnya, asas kekeluargaan dan kekerabatan pun menjadi aspek untuk syarat mereka memilih calon tersebut. Memilih berdasarkan karena adanya hubungan keluarga dan memiliki suku yang sama. Bahkan ada yang rela menjadi tim sukses calon tersebut hanya di karenakan ia memiliki suku yang sama dengan calon yang akan di pimpinnya itu .

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Kualitatif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2011: 11). Penelitian kualitatif yang hasilnya dideskripsikan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang kepercayaan masyarakat terhadap calon legislatif perempuan di kecamatan bintang timur kabupaten bintang. Teknik pengumpulan data, observasi dan wawancara. Analisis data yang akan digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Moleong (2011:6) adalah data dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena, tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik. Adapun langkah – langkah analisa data yang dilakukan adalah :

Reduksi Data. Data dari lokasi penelitian yaitu turun langsung menemui masyarakat kecamatan bintang timur yang sudah boleh memilih. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk mencari bagaimana agar masyarakat dapat mempercayai calon legislative perempuan . Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah dengan mewawancarai masyarakat kecamatan bintang timur yang sudah boleh memilih kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara berkaitan dengan kepercayaan. **Penyajian Data.** Penyajian data merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data yang di dapatkan di lapangan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap calon legislatif perempuan di kecamatan bintang timur tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

Penarikan Kesimpulan / Verifikasi. Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan oleh peneliti mulai dari pengumpulan data dengan informan kemudian observasi lapangan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan untuk menjawab kepercayaan masyarakat terhadap calon legislatif perempuan di kecamatan bintang timur kabupaten bintang

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

masyarakat kabupaten Bintang khususnya pada kecamatan Bintang timur, mereka tidak semerta-merta mempercayai perempuan untuk maju menjadi bakal calon legislatif. Mereka beranggapan bahwa perempuan cukup melakukan pekerjaan rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan mereka kurang percaya kepada perempuan untuk maju menjadi calon legislative seperti mereka tidak mengenali caleg perempuan itu sebelumnya dan mereka meragukan kualitas caleg perempuan itu sendiri. Melihat banyaknya masyarakat kecamatan Bintang timur yang kurang mempercayai perempuan untuk maju menjadi calon legislatif

mereka memiliki pandangan seperti :

a. Kemampuan dan pengalaman

Bahwa kemampuan dan pengalaman itu menjadi hal yang sangat penting untuk orang-orang yang akan terjun ke dunia politik. Bahkan masyarakat Kecamatan Bintan Timur beranggapan bahwa kemampuan dan pengalaman menjadi sebuah paket lengkap yang harus dimiliki politikus handal agar dapat memajukan dan mensejahterakan wilayah yang dipimpinnya. Namun ada juga masyarakat yang berpendapat bahwasanya perempuan itu diperlukan di parlemen tidak perlu menunggu adanya kemampuan dan pengalaman. Hal ini dikarenakan harus ada yang mencoba dan memulai untuk menjadi calon legislatif

b. Budaya

Masyarakat Kecamatan Bintan Timur kebanyakan bersuku Melayu dan Jawa. Suku Melayu dan Jawa umumnya menganut budaya patriarki di kehidupan sehari-hari. Budaya patriarki ini mempercayai kedudukan laki-laki di atas perempuan. Sehingga masyarakat pada umumnya terbiasa dipimpin oleh laki-laki. Selain itu masyarakat Kecamatan Bintan Timur juga merupakan masyarakat heterogen, sebagian masyarakat merupakan transmigrasi karena lapangan pekerjaan sehingga dalam memilih calon legislatif yang akan maju harus memiliki keuntungan buat mereka sendiri. Adapula masyarakat Kecamatan Bintan Timur yang sudah mulai memahami gender sehingga mereka sangat mendukung apabila perempuan mengikuti pemilihan umum

c. Status Sosial

Adanya campur tangan dari pihak-pihak tertentu yang dapat memenangkan calon legislatif perempuan itu sendiri menciptakan kekuasaan yang dapat menimbulkan intervensi sehingga masyarakat mengikutinya secara sadar dan menganggap hal itu sebagai hal yang wajar sehingga dapat memudahkan perempuan untuk maju ke pemilihan legislatif

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat kecamatan bintan timur kabupaten bintan timur, hal ini dapat dilihat dari :

Perempuan dan politik di Indonesia, perannya masih kalah dominan dibandingkan dengan peran laki laki. Padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang dapat membuat representasi wanita lebih kuat di ranah legislatif. Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 8 tahun 2012 yang mengharuskan partai politik mengirim minimal 30% perempuan di dalam parlemen.

Namun yang terjadi pada masyarakat kabupaten Bintan khususnya pada kecamatan Bintan timur, mereka tidak semerta-merta mempercayai perempuan untuk maju menjadi bakal calon legislatif. Mereka beranggapan bahwa perempuan cukup melakukan pekerjaan rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan mereka kurang percaya kepada perempuan untuk maju menjadi calon legislative seperti mereka tidak mengenali caleg perempuan itu sebelumnya dan mereka meragukan kualitas caleg perempuan itu sendiri. Melihat banyaknya masyarakat kecamatan Bintan timur yang kurang mempercayai perempuan untuk maju menjadi calon legislatif mereka memiliki pandangan seperti :

a. Kemampuan dan pengalaman

b. Budaya

c. Status Sosial

V. DAFTAR PUSTAKA

- Azis,A,2013, *Perempuan Di Persimpangan Parlemen : Studi dalam perspektif Politik Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Edukation
- Budiarjo Miriam,2008, *Dasar-dasar ilmu politik*,Edisi Revisi,Jakarta: Gramedia Pustaka utama
- Basrowi,Sukidin,Susilo,suko,*sosiologi politik*,Bogor: Ghalia Indonesia
- Damsar,2010,*Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta :KENCANA PRENADA MEDIA GROUP
- Kartono,Kartini,2009,*Pemimpin dan /kepemimpinan*, Jawa Barat: Raja Grafindo persada
- Mulia,Siti Musdah dan Anik Farida,2005,*perempuan dan politik*,Jakarta : Gramedia
- Nazsir,Nasrullah,2009,*teori-teori sosiologi*,Bandung, Widya padjajaran
- Nugroho,R,2008,*Gender dan Strategi Pengarus Utamaannya Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Poloma,Margareth,2010,*Sosiologi Kontemporer*,Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Primawati,Septina,2008,*Perempuan Dalam Dimensi Politik*,Pekanbaru :Pusdatin Puanri
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono,2016,*metode peneltian kualitatif kuantitatif dan R dan D*, Bandung : Alfabeta
- Sanopaka,Endri,2019,*Upacara Adat Tradisional Masyarakat Kepulauan Riau*, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
- Soetomo,2008,*Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar